

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
11	SUARA KARYA	12	13-8-2002

Pemkab Setujui 51 Persen Saham KPC Jatuh Ke Pusat

JAKARTA (Suara Karya): Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, Awang Faroek, menegaskan sikapnya untuk tetap memperjuangkan aspirasi daerah yang ingin membeli 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC). Meskipun demikian ia mengakui, divestasi 51 persen saham PT KPC itu memang harus jatuh ke tangan pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi.

"Kami menginginkan persoalan KPC berakhir dengan baik. Ada win-win solution tentang aspirasi dari daerah yang harus diterima para pejabat lintas sektoral," ujar Awang usai rapat forum yang membicarakan persoalan KPC dengan Ketua Tim Interdep, Joko Darmono, di Gedung Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDEM), Jakarta, Senin (12/8).

Sebelumnya, PT KPC sudah memberikan penawaran 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Keputusan pemerintah menyebutkan,

51 persen saham tersebut dibagi 20 persen untuk pemerintah pusat yang akan diberikan kepada PT Aneka Tambang, sedangkan 31 persen sisanya diberikan kepada pemerintah daerah (Pemprov dan Pemkab).

Awang kembali menjelaskan, dalam pertemuan tersebut sudah disampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah, termasuk kondisi keamanan di Provinsi Kalimantan. "Kita ingin menjaga stabilitas keamanan di daerah, demi kepentingan bersama," tambah dia.

Ketika ditanyakan sikap Pemkab Kutai Timur, dia mengatakan, prinsipnya Pemkab Kutim setuju bahwa 51 persen saham KPC jatuh ke pemerintah pusat sesuai kontrak termasuk di dalamnya pemerintah kabupaten dan provinsi.

Dia menolak berkomentar tentang hasil pertemuannya dengan para pejabat Interdep, dan hanya menyebutkan bahwa, forum tersebut tidak membicarakan masalah itu, kutip *Lippostar*. (W-1)

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
11	KOMPAS	14	13-8-2002

DPR Dukung Pembentukan Konsorsium untuk Divestasi Saham KPC

BALIKPAPAN, KOMPAS — Wakil Ketua DPR AM Fatwa dan Ketua Komisi VIII Iwan Prayitno mendukung gagasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk konsorsium bagi para peminat 51 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang wajib didivestasikan. Meski demikian, DPR tetap berpendapat bahwa Kalimantan Timur semestinya mendapat porsi saham yang jauh lebih besar daripada pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Kaltim Syaiful Teteng mengenai hasil pertemuannya dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin (12/8). Rombongan Muspida Provinsi Kaltim bersama Muspida Kabupaten Kutai Timur dan ketua-ketua komisi maupun ketua fraksi di DPRD I Kaltim dan DPRD II Kutai Timur saat ini tengah berada di Jakarta memperjuangkan divestasi 51 persen saham KPC untuk Kaltim.

Senin pagi, rombongan yang dipimpin Syaiful Teteng itu bertemu dengan tim dari lintas departemen, sementara Gu-

bernur Suwarna mencoba bertemu Presiden Megawati di Bandung. Hari Selasa ini rombongan akan bertemu dengan Badan Intelijen Nasional (BIN), dan tetap akan berusaha bertemu dengan Wakil Presiden Hamzah Haz maupun Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut Teteng, dalam pertemuan dengan AM Fatwa dan Komisi VIII DPR kemarin telah disampaikan sejumlah ganjalan yang dirasakan Pemprov Kaltim dalam divestasi saham KPC. "Intinya, kenapa sih kita ini kok sepertinya rebutan tulang. Kenapa sih pemerintah pusat kok tidak *legowo*," katanya.

Kepada AM Fatwa juga disampaikan situasi pro-kontra di tengah masyarakat Kaltim yang tidak tertutup kemungkinan menjadi bibit-bibit pertikaian horisontal antar-masyarakat, jika proses divestasi ini tidak segera diselesaikan.

Menanggapi semua paparan rombongan dari Kaltim itu, Fatwa sepenuhnya mendukung upaya daerah memperoleh

bagian lebih besar dalam divestasi itu. Untuk itu, Senin malam dijadwalkan Fatwa akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. "Kita tunggu saja hasilnya," katanya.

Tidak ambil keputusan

Dalam pertemuan dengan tim lintas departemen pada pagi harinya, menurut Teteng, sempat muncul berbagai usulan. Antara lain agar secepatnya dilakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap para penawar, termasuk pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, Pemkab Kutai Timur, dan para mitranya. *Due diligence* juga diharapkan segera dilakukan terhadap KPC. Lalu muncul juga usulan agar dibuat *time frame* dalam keseluruhan rangkaian proses divestasi KPC.

"Tetapi, sejak awal kita mengingatkan agar pertemuan lintas departemen ini tidak mengambil keputusan soal pembagian saham. Karena forum ini memang bukan pada posisi mengambil keputusan," kata Teteng. (MSH)

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	REPUBLIKA	11	13-08-2002

Marak, Penyelundupan BBM ke Timtim

ATAMBUA— Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kedapatan hendak menyelundupkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah Timor Timur mengaku nekad melakukan hal itu karena meniru ulah pedagang besar yang sering lolos dari pengawasan.

Kepada Dandim 1605/Belu, Letkol Kav Tjuk Agus Minahasa, Senin (12/8) mereka mengakui perbuatan mereka hendak menjual minyak tanah di pasar ilegal kawasan tapal batas Silawan yang berseberangan dengan wilayah Balibo, Distrik Boboanro, Timtim. ■ ant

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA PEMBARUAN	6	12-08-2002

Bank Dunia Ingin Aset Pertamina Dipecah

Dicurigai, Surat Bank Dunia Menyuarakan Kepentingan Investor Asing

JAKARTA - Bank Dunia ingin restrukturisasi di bidang hilir minyak dan gas (migas) di Indonesia mulai digerakkan pada November 2002. Langkah awalnya, pada bulan itu pemerintah harus mengubah Pertamina menjadi persero.

Selanjutnya, lembaga dana internasional itu juga ingin agar aset strategis Pertamina dipecah-pecah dalam suatu perusahaan tersendiri, atau melakukan *joint venture* dengan perusahaan migas lainnya.

Pengamat migas, Kurtubi yang dihubungi *Pembaruan*,

di Jakarta, Senin (12/8) mencurigai, keluarnya surat Bank Dunia ini menyuarakan kepentingan investor migas asing, yang ingin segera ikut masuk ke Indonesia dengan biaya yang murah.

Keinginan Bank Dunia tertuang dalam surat Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Mark Baird kepada Menteri Keuangan Budiono pada 28 Mei 2002 lalu. Surat dua halaman itu juga dilengkapi dengan lampiran ditel menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan Indonesia saat melakukan restrukturisasi. "Maksud kebijakan ini adalah menciptakan iklim investasi yang *fair* dan transparan di sektor hilir," kata Mark.

Karena alasan itu, ia melihat restrukturisasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga monopoli Pertamina tidak terjadi lagi. Dalam restrukturisasi itu, peme-

rintah juga harus membuat satu atau dua perusahaan pengolahan dan pemasaran baru.

Caranya, dengan memecah aset-aset strategis yang dimiliki negara, seperti kilang Cilacap dan Balongan, ke dalam suatu perusahaan terpisah. "Selanjutnya, pengembangan perusahaan baru itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain," katanya.

Dengan cara itu, Bank Dunia memprediksikan, di masa yang akan datang, peranan pemerintah di sektor hilir akan berkurang drastis, bahkan investasi bisa berjalan tanpa peran serta pemerintah. Struktur seperti ini juga sudah dilakukan di beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. "Mereka bisa melakukannya dengan baik," kata Mark.

Sebelum restrukturisasi Pertamina dilakukan, harus ada badan regulator pemerin-

tah yang mengatur usaha hilir migas. Namun, agar perubahan berjalan baik, Dewan Komisaris Perusahaan Pertamina (DKPP) harus difungsikan sebagai *steering committee* untuk memandu rencana pemerintah dan realisasi perubahan di lapangan. Selain itu, mereka juga harus berperan aktif dalam penyusunan peraturan pemerintah sektor hilir.

Agar tugas-tugas bisa dilaksanakan dengan baik, mereka akan dibantu *advisor* independen, antara lain untuk mengkaji alternatif struktur pasar, evaluasi aset strategis, dan meneliti kontrak mengenai berbagai kesepakatan termasuk jual beli minyak.

Nantinya, transformasi Pertamina menjadi persero akan dilakukan dalam waktu dua tahun. Namun, selama empat tahun pertama, mereka masih wajib mendistribusi BBM di dalam negeri.

Seiring dengan restrukturisasi sektor hilir, Bank Dunia juga ingin agar harga BBM dan gas alam ditetapkan berdasarkan mekanisme yang *fair* dan bisnis yang sehat. Dengan syarat, implementasi penetapan harga ini tidak mengurangi kebijakan sosial pemerintah.

Agenda Tersembunyi

Namun Kurtubi menilai, surat Bank Dunia itu menyembunyikan agenda lain, yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan investor migas dunia. "Bank Dunia sangat sadar bahwa sistem pemasaran dan pengolahan Pertamina yang integrasi itu menjadi halangan bagi pemain baru. Karenanya, mereka berusaha memecah aset strategis Pertamina menjadi perusahaan-perusahaan kecil, dengan harapan suatu saat bisa diakuisisi," tambahnya.

Kekesalan Kurtubi ber-

tambah karena arahan Bank Dunia ini juga melenceng dari bunyi UU Migas baru. Dalam aturan itu, katanya, aset-aset strategis Pertamina, baik di bidang pengilangan, pemasaran dalam negeri, transportasi, maupun *storage*, masih bisa dilakukan dalam satu izin usaha, yakni dalam suatu perusahaan yang utuh. "Jadi, mengapa mereka memaksa kita memecah aset?" tanyanya.

Seharusnya, kata Kurtubi, Bank Dunia tidak perlu mengatur ditel masalah restrukturisasi di bidang hilir. Kalau niatnya ingin mengakomodasi investor asing, biarkan mereka masuk melalui pendekatan bisnis biasa.

"Kalau rancangannya seperti yang diinginkan Bank Dunia, hal itu berarti mereka ingin menghancurkan Pertamina terlebih dulu, sebelum berkeinginan mengambil aset-aset strategisnya," demikian Kurtubi. (K-10)

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA PEMBARUAN	11	12-08-2002

Wajah Buruk Pertambangan Indonesia (1)

Izin Diobral, Lingkungan Dirusak

HINGGA tahun 2001, perizinan yang dikeluarkan untuk dunia pertambangan sudah sangat tidak rasional. Lebih dari 35 persen lahan daratan Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Saat ini, pertambangan menjadi industri ekstraktif yang paling banyak menguasai lahan daratan Indonesia.

Data organisasi nonpemerintah (Ornop) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menunjukkan, hingga akhir tahun 2001, pemerintah telah mengeluarkan izin pertambangan sebanyak 32.461 buah, terdiri dari 893 izin Kuasa Pertambangan seluas 32.765.833 hektare (ha), izin Kontrak Karya sebanyak 105 dengan luas 25.715.557 ha, izin KKB/PKP2B untuk tambang batubara sebanyak 110 dengan luas 8.410.106 ha, serta 2.138 izin SIPD2 yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Departemen Pertambangan (sekarang Departemen ESDM) hanya menjadi lembaga pemberi izin bagi perusahaan tambang, dan menjadi lembaga superior yang mengalahkan kebijakan-kebijakan sektor lain.

Padahal, dalam praktiknya, pertambangan menimbulkan banyak masalah, baik bagi masyarakat lokal dalam bentuk pelanggaran HAM, pengusuran lahan, maupun perusakan lingkungan hidup.

Menurut Ketua Jatam, Chalid Muhamad, banyak kasus pertambangan yang tercatat berasal dari pertambangan skala besar, mulai Freeport (1967-sekarang), Inco (1974-sekarang), Newmont Minahasa Raya (1996-sekarang), Newmont Nusa Tenggara (1999-sekarang), Indo Muro Kencana (1987-sekarang), Kelian Equatorial Mining, Unocal (1998-sekarang), Kideco Jaya Agung

(1992-sekarang), Adaro, hingga Arutmin.

Chalid mengatakan perusahaan-perusahaan asing itu juga memelopori transfer teknologi buruk dalam pengelolaan limbah, yang ternyata diharamkan di negara asalnya, seperti pemakaian sistem pembuangan tailing (STD) ke laut oleh Newmont (AS) di Minahasa dan Sumbawa. Dua perusahaan akan menyusul menggunakan STD. Mereka adalah BHP (Australia) di Pulau Gag, Papua, dan Weda Bay Mineral (Kanada).

Menurut Chalid, keduanya adalah perusahaan yang sedang dipaksakan lolos menambang di hutan lindung Pulau Gag di Papua dan Cagar Alam Lalobata di Maluku Utara. Ironis memang, karena STD secara otomatis dilarang keras di AS, Australia, dan Kanada.

Perusahaan nasional juga tidak kurang berperan da-

lam merusak lingkungan dan menggusur lahan masyarakat adat, seperti PT Arumbai (1997-sekarang), Indomindo Mandiri, Antaim Pongkor, dan Antam Pomala (1995-sekarang).

Bagaimana dengan tambang rakyat? Selama 10 tahun terakhir, kata Chalid, banyak kawasan penambangan tradisional yang digusur oleh pertambangan besar, seperti PT KEM dan PT IMK. Yang terjadi akhirnya mereka harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, dan dipaksa meninggalkan cara mendulang yang dianggap kurang produktif.

Pengusuran wilayah pertambangan tradisional itu mengawali masa penggunaan merkuri, bahan kimia beracun lain secara besar-besaran oleh kegiatan pertambangan rakyat. Bahkan, mereka harus mengais di kolam limbah tambang perusahaan agar bisa kembali menam-

bang. Sementara, pemerintah tak segan-segan memberi predikat penambang rakyat itu dengan sebutan Peti (penambang tanpa izin) atau penambang liar.

Lembaga Keuangan Global

Peran lembaga keuangan global juga mewarnai buruknya wajah pertambangan di Indonesia. Survei Industri Pertambangan di tahun 2001 yang dilakukan PwC menunjukkan betapa pendanaan dari utang masih mendominasi industri pertambangan, bahkan jumlahnya 3,6 kali jumlah modal yang disetorkan.

Beberapa perusahaan besar seperti Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan Inco yang membangun perangkat pertambangan dengan mekanisme Export Credit Agencies (ECA). Skema ECA mewajibkan pemerintah menanggung sejumlah utang jika terjadi masalah atau

kegagalan dalam pertambangan NNT. Dan, utang negara secara tidak langsung menjadi utang rakyat Indonesia.

Bahkan, untuk menutup pertambangan itu, pada tahun 2003, PT KEM mendapat pinjaman Bank Dunia dengan tanggungan Pemerintah Indonesia. Sumber daya mineral terkuras habis, lahan bekas tambang rusak berat, dan harus menanggung utang untuk memperbaikinya.

Padahal, jika dihitung, kontribusi industri pertambangan untuk negara sangat rendah. Antara tahun 1993 dan 1995, misalnya, hanya berkisar antara 2,54 hingga 2,92 persen dari pendapatan kotor domestik (PDB).

Selain itu, menurut survei yang sama di tahun 1999, pembelanjaan yang dilakukan oleh 12 perusahaan pertambangan besar di Indonesia tahun 1994-1998

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

hampir 95,3 persen digunakan untuk pembelian lewat impor. Artinya, uang yang ada kembali ke kantong negara asing, hanya sisa sebesar 4,7 persen yang ditinggal di dalam negeri.

Selama ini, negara dikedah dengan angka kontribusi sektor pertambangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian PwC menyimpulkan, pendapatan negara tahun 1998 dari 12 industri tambang yang mereka survei sebesar Rp 5,6 triliun. Sepintas angka itu terlihat sangat besar.

Angka itu yang selalu dibanggakan oleh pelaku pertambangan di Indonesia, termasuk pemerintah. Hal itu tentu tidak sebanding dengan pengrusakan dan hilangnya mata pencarian ratusan ribu masyarakat lokal di sekitar pertambangan. Anehnya, industri keruk yang begitu destruktif itu masih menjadi primadona bagi negara.

Secara sistematis, pemerintah berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan di Indonesia. Bahkan, dengan berani, pemerintah menggadaikan nasib generasi mendatang, kehancuran lingkungan hidup, penderitaan masyarakat adat, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa kasus tertentu menunjukkan pemerintah tidak segan-segan menggunakan aparat militer untuk merepresi rakyat yang melawan kehadiran pertambangan di tanah mereka. Dari situ pelanggaran HAM pun terjadi. Tidak heran jika pertambangan di Indonesia tergolong industri yang sarat dengan pelbagai peristiwa pelanggaran HAM.

Menurut Chalid, sejak awal, kegiatan perusahaan pertambangan selalu melibatkan aparat negara yang represif. Tujuannya untuk meredam perlawanan penduduk lokal. Namun, yang disampaikan ke publik adalah untuk menjamin rasa aman dalam bekerja.

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	REPUBLICA	15	13-08-2002

DPR Desak Bentuk Pansus Pencurian Pasir Laut

Kalau pemerintah tak mampu menangani, DPR akan prakarsai pembentukan pansus untuk memanggil orang kuat yang terlibat.

JAKARTA — DPR mendesak dibentuknya panitia khusus (pansus) sehubungan dengan semakin maraknya pencurian pasir di kawasan Riau. Sejumlah kasus yang mencuat yang berkaitan dengan hal ini harus diselesaikan dengan transparan. Demikian antara lain ditegaskan Priyo Budi Santoso, anggota Komisi VIII DPR kepada pers, kemarin (12/8).

Menurut Priyo, desakan pembentukan pansus ini tidak hanya berlaku bagi para pencuri pasir yang ditenggangi oleh sejumlah pengusaha asal Jakarta, tapi juga berlaku untuk pemerintah. "Harusnya pemerintah menghentikan semua praktik ile-

gal. Kalau pemerintah tidak mampu menangani, saya akan prakarsai pembentukan pansus untuk memanggil orang-orang kuat yang terlibat dan minta penjelasan. Kami punya data cukup untuk memanggil mereka," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Keluarnya Keppres No 33/2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut tersebut dinilai sebagai puncak pertarungan berbagai kelompok kepentingan dalam bisnis pasir laut. Di dalam keppres itu masih ada klausul zonasi dan volume ekspor pasir laut yang bisa "dimainkan".

Oleh karena itu ia berpendapat, eksploitasi dan pengendalian pasir laut tidak cukup diatur dengan keppres, tetapi seharusnya undang-undang agar berbagai pihak, termasuk DPR, punya wewenang untuk mengawasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh kapal keruk ilegal yang tengah mencuri pasir laut di perairan Riau dan tertangkap basah oleh pasukan patroli TNI AL dari Armada Barat (Armabar) pada 25-26 Juli silam, diduga kuat dibekingi oleh seorang pejabat penting di Jakarta.

Sedianya Tim Pengendali dan Pengawas Pasir Laut (TP4L), yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, akan mengambil keputusan pada Jumat silam. Namun karena alasan teknis, keputusan ditunda hari ini (Selasa, 14/8). "Mudah-mu-

dahan Selasa pekan depan penyidikannya sudah tuntas," kata Rokhmin.

Ke-7 kapal keruk ilegal yang ditangkap TNI AL itu kini masih ditahan di Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Tanjung Uban. Kasus yang ditangani tim gabungan yang beranggotakan petugas dari Mabes TNI AL, Kementerian Kelautan, Imigrasi, dan Bea Cukai.

Dalam penjelasannya sebelumnya, Rokhmin mengaku pihaknya menerima laporan dari tim penyelidik gabungan. Hasil penyelidikan tersebut, akan diajukan pada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya diproses lewat pengadilan. "Tim penyidik akan menentukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masing-masing kapal. Log book (catatan kegiatan kapal) telah disita," tandasnya.

Menurut Rokhmin, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan. Menurutnya, kemungkinan akan ada tiga putusan: pencabutan surat izin penambangan, hukuman pidana, atau denda seberat-beratnya. "Mana hukuman yang akan diambil, terserah pengadilan."

Sementara itu, sebuah sumber di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengatakan, para pemilik kapal itu tengah sibuk melobi TP4L dengan berbagai cara untuk membebaskan kapal itu. Akibatnya, tim mengalami "tekanan" berat karena pemain di bisnis ini bukan "orang sembarang-an".

Rokhmin menjelaskan, TP4L akan menyelesaikan secara tuntas dengan membuat jera para pengusaha yang nakal. Negara rugi Rp 2,7 triliun setiap tahun.

■ one/ban

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	BISNIS INDONESIA	6	13-07-2002

DPR: Adili 7 kapal pelanggar ekspor pasir laut sesuai hukum

JAKARTA (Bisnis): Kalangan DPR meminta pemerintah tidak bersikap diskriminatif dalam menjatuhkan sanksi terhadap tujuh kapal asing pengangkut pasir laut yang melanggar ketentuan ekspor.

Anggota Komisi VIII Priyo Budi Santoso menegaskan semua kapal pengeruk pasir laut yang beroperasi secara ilegal harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Semua harus ditindak tegas dan diproses lewat pengadilan, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap kapal-kapal pencuri pasir laut yang tertangkap tangan tersebut," katanya di Jakarta kemarin.

Jajaran Armada Barat TNI AL diketahui baru-baru ini menangkap tujuh kapal yang tidak dilengkapi dengan dokumen prasyarat penambangan dan ekspor pasir laut di Riau.

Ketujuh kapal itu adalah *MV Professor Gurjonov* (Rusia), *MV Samsung Apollo* (Korea) dan *MV Vasco Da Gamma* (Belanda). Mereka ditangkap di Selat Durian

Kapal lainnya adalah *TB Olivia V* dan *TB Jasmine* (keduanya berben-

Kapal Asing Pelanggar Ekspor Pasir Laut	
Nama	Asal Negara
1. Apollo Samsung	Korsel
2. Van Holth	Luxemburg
3. Lange Wurapper	Belgia
4. TB Olivia V	Jepang
5. TB Jasmine	Jepang
6. Vasco Da Gamma	Belanda
7. Prof. Gorjionof	Rusia

Sumber: TP4L

dera Jepang) ditangkap di Tanjung Balai Karimun. Sedangkan dua kapal lainnya masing-masing *MV Alexander Van Holth* (Luxenburg) dan *MV Lange Wurapper* (Belgia) ditangkap di Tanjung Uban, Sumut.

Priyo menilai Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan—selaku ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L)—yang hanya memberikan sanksi admistrasi berupa denda merupakan sikap lemah dari pemerintah.

"Dengan hanya memberikan sanksi denda, ini sama saja menjual nama bangsa Indonesia karena sebenarnya tindakan pencuri pasir laut itu sudah masuk dalam kategori pidana sehingga harus diproses sesuai KUHP," tegasnya.

Menurut Priyo, pemerintah harus bisa bertindak tegas agar Indonesia dihargai oleh dunia internasional. Menurut dia, apabila setiap pelanggaran pidana diselesaikan melalui pemberian sanksi administrasi—padahal kasus ini juga merupakan pelanggaran terhadap batas wilayah negara—maka hukum Indonesia tidak dihargai oleh internasional.

"Apalagi, sanksi denda itu tidak setara dengan kerusakan dan kerugian materiil dan imaterial yang telah ditimbulkan akibat pengerukan pasir laut secara ilegal itu, katanya.

Dia menambahkan sesuai Kepres No.33/2002—tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir

Laut—disebutkan bahwa setiap pelanggaran atas ketentuan yang ada dalam kepres akan ditindaklanjuti sesuai perundangan yang berlaku.

"Artinya kalau dalam kasus ini terdapat tindak pidana maka penyelesaiannya harus di pengadilan dan tidak boleh diskriminatif," katanya.

Akan diadili

Apabila sanksi diberikan secara diskriminatif, katanya, maka akan muncul peluang terjadinya kolusi antara pejabat yang berwenang dengan dengan pemilik kapal tersebut. "Karena itu sanksi hukumnya harus sama terhadap semua pemilik kapal."

Sementara itu, Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri saat dikonfirmasi menegaskan tim yang dipimpinnya tidak akan bersikap diskriminatif dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pemilik kapal keruk pasir laut yang tertangkap itu.

"Ketujuh kapal yang ditangkap itu saya pastikan semua berkas pemeriksaan oleh tim akan diserahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut secara hukum lewat pengadilan," tegasnya ketika dihubungi kemarin.

Dia mengatakan sanksi tersebut bisa berupa pencabutan izin usaha (samasekali dilarang beroperasi), hukuman badan dan sanksi denda. "Tentunya sanksi itu tergantung pada tingkat kesalahannya. semua itu tergantung keputusan dari pengadilan."

Dia menandakan hingga saat ini tujuh kapal yang tertangkap tersebut masih ditahan oleh Tim Pengendalian dan Pengusahaan Pasir Laut. "Hingga saat ini tim ini masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang akan selesai besok (hari ini)."

Menurut dia, semua berkas hasil pemeriksaan tersebut baru dapat dilimpahkan ke kejaksaan paling lambat minggu depan. "Yang jelas tidak akan ada diskriminasi dan keputusan sepenuhnya ada pada pengadilan." (cp)

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	RAKYAT MERDEKA	12	13-8-2002

DPR Mau Usut KKN Pasirgate



JANG
an g g a p
enteng ma-
salah pasir
laut. Justru
gara-gara
keruwetan

bisnis pasir itu, DPR akan membawa persoalan ini ke pansus. Kalangan dewan malihat persoalan pasir laut ini sudah campur baur antara urusan perut pejabat, politisi hingga pengusaha. "Bukan itu saja, kita (DPR—red) bisa menggunakan hak interpelasi—minta keterangan kepada Presiden Megawati mengenai perdagangan pasir laut ini. Kok hingga kini belum juga beres," kata anggota DPR dari F-PG Priyo Budisantoso dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Prakarsa pembentukan Pansus dan penggunaan hak interpelasi juga akan membahas soal penangkapan kapal pengeruk serta menanyakan tindak lanjut masalah ini ke presiden. Karena, pengalaman selama ini, bila kapal-kapal berbendera negara lain tertangkap, maka dilepaskan lagi. Harusnya, kapal-kapal itu dikenai tindak pidana, termasuk para pemilik dan orang-orang yang berada di belakangnya. "Kasus ini harus dibongkar secara tuntas dan transparan. Menurut saya, pemerintah harus menyita kapal-kapal itu agar jadi milik pemerintah," tegasnya.

Dia menjelaskan, masalah pasir laut ini, tidak semata-mata soal ekonomi dan bisnis semata. Tapi, juga persoalan ini menyangkut martabat bangsa. Kabarnya, kata sumber *Rakyat Merdeka* di DPR, menyebutkan, pengerukan pasir laut itu ada kerjasama dengan Pemerintah Singapura. (WIN)

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	MEDIA INDONESIA	2	13-8-2002

DPR Ancam Bentuk Pansus untuk Kasus Pasir Laut

■ Pemerintah Diminta Bicara dengan Singapura

JAKARTA (Media): DPR mengancam membentuk panitia khusus (pansus) dan menggunakan hak interpelasi jika penyelesaian pasir laut tidak kunjung selesai dan tidak ada *progress report* menggembirakan. Demikian diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Priyo Budisantoso menanggapi penangkapan tujuh kapal keruk pasir laut oleh TNI-AL di Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.

Menurut Priyo, prakarsa pembentukan pansus dan penggunaan hak bertanya pihak Dewan itu bertujuan untuk menuntaskan persoalan pasir laut, termasuk penangkapan tujuh kapal keruk itu. Juga, untuk menanyakan tindak lanjut persoalan tersebut ke Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Pengalaman selama ini, kapal-kapal yang tertangkap dilepas lagi. Karena itu, satu-satunya jalan, pemerintah harus serius soal ini. Dan, ujiannya adalah penangkapan tujuh kapal pengangkut pasir laut," kata Priyo dalam acara diskusi di radio *Trijaya FM* di Jakarta, kemarin.

Priyo menyebutkan kasus pasir laut sebenarnya tidak semata-mata persoalan ekonomi dan bisnis, tapi juga menyangkut martabat bangsa. Karena itu, kata aktivis Partai Golkar itu, Presiden harus membicarakan masalah ini dalam pertemuan dengan pemimpin Singapura.

"Kalau benar Singapura membiarkan itu, berarti Singapura negara penadah. Itu sama saja dengan aneksasi atau pencaplokan baru," tegasnya.

Ia menambahkan, jika Presiden Megawati tidak berani melakukannya, dirinya akan mengambil alih posisi itu.

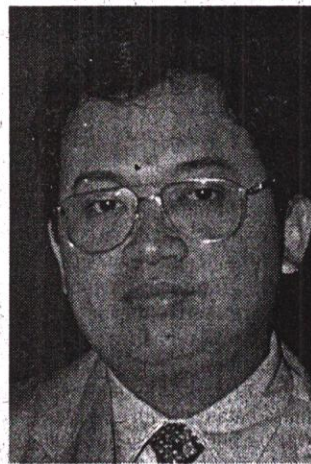
Selain mengancam membentuk Pansus Pasir Laut dan interpelasi, Priyo juga mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L). Ia menegaskan penangkapan tujuh kapal keruk adalah pertaruhan kehormatan dan jabatannya Rokhmin. Terutama kalau kapal tersebut dilepas dan tidak ada penyelesaian menggembirakan.

Menurut Priyo, sanksi administratif berupa denda terhadap tujuh kapal keruk yang ditangkap itu tidak cukup membuat jera. Karena itu, perlu sanksi pidana kurungan atau penjara terhadap pemilik dan orang-orang di belakangnya. Di samping itu, kapal-kapal tersebut juga harus disita untuk negara.

Mengenai undang-undang mana yang dipergunakan untuk menjerat pelaku tersebut, kata Priyo, itu urusan pemerintah untuk mencari undang-undang paling sakti guna menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Yang jelas, kata dia, pemerintah tidak boleh diskriminatif dalam menerapkan hukum. Tidak peduli orang kuat mana pun, dari lingkungan apa pun, tujuh kapal tersebut harus diusut sesuai prose-

dur hukum.

"Tak boleh ada yang kebal hukum. Orang-orang di lingkungan istana presiden pun, kalau memang terlibat dalam pencurian atau tindak kejahatan pasir laut, juga harus ditindak tegas," tegasnya.



■ Priyo Budisantoso

Pengamat maritim Djuanda menegaskan masalah pasir laut berkaitan dengan elite-elite tertentu, termasuk oknum yang memiliki NRP (nomor registrasi pokok) dan 'klik' istana. Menurutnya, oknum-oknum berseragam maupun yang tak berseragam dan yang memunyai NIP maupun NRP, termasuk orang-orang yang memiliki *channel* dengan pihak istana presiden harus ditindak secara tegas.

"Kalau hal itu tidak dilakukan, jangan berharap martabat bangsa dan martabat TNI akan menjadi baik. Karena itu, masalah ini harus segera diatasi secara be-

nar dan adil," ungkapnya.

Priyo menambahkan, akibat pencurian pasir, negara dirugikan Rp2,7 triliun per tahun. Juga, terjadi perusakan terumbu karang, taman laut, abrasi, dan beberapa pulau kecil tinggal nama saja karena tenggelam. Di samping itu, dari sisi sosial juga sangat merugikan nelayan kecil dan penduduk pesisir.

Zonasi pasir laut

Dari Pekanbaru dilaporkan, Bupati Karimun HM Sani mengungkapkan meski keputusan penetapan zonasi pasir laut masih dalam proses, Karimun sebagai daerah penghasil pasir laut siap menjalankan zonasi pasir laut. Apa pun hasil keputusan mengenai zonasi pasir laut, menurut Sani, pihaknya harus proaktif mengantisipasi maraknya eksploitasi pasir laut secara ilegal.

"Bila memang telah ada keputusan Departemen Kelautan dan Perikanan soal ketentuan zonasi pasir laut, kita siap menjalankan."

Sani mengakui di masa transisi telah membawa dampak bagi keberadaan perusahaan penambangan pasir laut yang terdapat saat ini. Buntut belum dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan soal zonasi, beberapa perusahaan mencoba melakukan eksploitasi dengan cara gelap.

Tudingan bahwa pihaknya telah mengeluarkan kuasa penambangan (KP) pasir laut untuk melakukan pengerukan satu mil dari garis pantai dibantah Sani. "Kami kan punya perda soal *range* lokasi pasir laut itu dari pantai. Perda itu juga tidak membenarkan di bawah satu mil."

(Sdk/Uut/TH/E-1)

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	SUARA KARYA	9	13-8-2002

Megawati Diminta Bicarakan Soal Pasir Laut Dengan Pemimpin Singapura

JAKARTA (Suara Karya): Sidang Tahunan MPR baru saja selesai, Megawati sudah diancam akan diinterpelasi. Kemarin, anggota Komisi VIII DPR RI Priyo Budisantoso sewot karena Presiden Megawati tidak serius masalah penyelundupan pasir laut.

Bahkan, Priyo juga mengancam dengan memprakarsai pembentukan Pansus (Panitia Khusus) pasir laut, jika masalah tersebut tak ada *progress report* yang mengembirakan dalam hal penyelesaian pasir laut.

Menurut Priyo, prakarsa pembentukan Pansus dan penggunaan hak interpelasi itu adalah untuk menuntaskan persoalan pasir laut secara sungguh-sungguh. "Kalau Presiden tidak menindaklanjuti penangkapan 7 kapal keruk pasir laut itu, kita akan bentuk Pansus dan kita akan gunakan hak interpelasi," katanya saat diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Priyo juga menegaskan, sanksi denda bagi 7 kapal pengeruk pasir yang tertangkap itu adalah tidak cukup. Menurutnya, terhadap kapal-kapal pengeruk itu harus ditindak dengan pidana, termasuk para pemilik dan mereka yang ada dibelakangnya. "Saya bahkan meminta pemerintah untuk menyita kapal-kapal tersebut, sehingga jadi milik pemerintah," tandas Priyo.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu 7 kapal keruk pasir laut tertangkap di perairan Riau. Tapi, 7 kapal ini tidak diproses, melainkan dibentuk Tim Pengendali, Pengawas dan Pengusahaan Pasir Laut (P4L) yang diketuai Menteri Kelautan Rochmin Dhaehuri.

Selain mengancam membentuk Pansus dan interpelasi, Priyo mengingatkan Menteri Kelautan Rochmin Dhaehuri. Kata Priyo, penyelesaian terhadap 7 kapal keruk tersebut adalah pertarungan kehormatan dan jabatan bagi Rochmin Dhaehuri.

"Kalau sampai kapal-kapal itu, dilepas, itu terlalu berani. Kalau tidak ada kabar mengembirakan, Roch-

min sudah pertaruhkan kehormatan dan jabatannya. Soal ini ujian bagi pemerintah," ujar vokalis DPR ini.

Persoalan pasir laut, lebih jauh Priyo menandakan, sebenarnya tidak semata-mata urusan ekonomi dan bisnis, melainkan juga menyangkut persoalan martabat bangsa. Karena itu, lanjutnya, Presiden harus membicarakan masalah ini dalam pertemuannya dengan pemimpin Singapura.

"Kalau benar Singapura membiarkan, itu berarti Singapura negara penadah. Itu sama saja dengan aneksasi atau pencaplokan baru," tegas dia sambil menambahkan, jika Presiden Megawati tidak berani, dirinya akan mengambil over posisi itu.

Sementara itu, pengamat maritim, Djuanda menjelaskan dibalik urusan ekonomi dan hukum pasir laut, adalah terkait dengan tren menjadikan Singapura sebagai negara pengontrol perairan Indonesia. Dari sisi geo politik, jelas Djuanda, ada tren transport maritim yang sangat penting yang melalui perairan Indonesia. Transport maritim itu dikontrol oleh K4: komando, kontrol, kendali, komunikasi yang ada di Singapura.

Jadi, hal itu untuk mengancam transpor maritim ini, karena terkait dengan perdagangan luar biasa besar, terutama perdagangan energi, ekspor impor Tiongkok, Jepang dan Korea dan kepentingan lainnya. Dipilih Singapura karena dianggap bisa mengontrol perairan Indonesia dan selat Malaka, karena secara tradisional jalur itu sudah ratusan tahun digunakan," katanya saat diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Djuanda, Indonesia harus bisa mengatur perairan dan wilayahnya, sebab negara yang tidak bisa mengatur negaranya sendiri adalah negara yang tidak bermartabat. Dan hal itu akan menurunkan ranking Indonesia di hadapan dunia internasional. (H-3)

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SVARA KARYA	8	13 - 8 - 2002

PT Timah Industri Kerjasama Dengan PT AS Bangun Pabrik Sawit

PANGKALPINANG (Suara Karya): PT Tambang Timah Industri (PT TI) bekerjasama dengan PT. Asiana Niaga (PT.AS) dalam waktu dekat ini akan membangun pabrik sawit yang berlokasi di Jambi guna menampung produksi petani.

"Rencana pembangunan pabrik minyak sawit itu ditandai penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktur Utama PT.TI, Ari Fauzi dengan Dirut PT.AS, Petrus Chandra di kantor pusat PT. Timah, Pangkalpinang, belum lama ini.

Dirut PT.AS, Petrus di Pangkalpinang, Sabtu menjelaskan, keinginan kerjasama mendirikan pabrik crude palm oil (CPO) itu mengingat potensi hasil perkebunan sawit di nusantara cukup menjanjikan.

Menurutnya, dari 3,4 juta hektar areal perkebunan kelapa sawit di Tanah Air, sebagian besar dikuasai perusahaan swasta yang telah memiliki pabrik sendiri, dan sekitar 600 ribu ha diantaranya kebun yang diusahakan masyarakat belum memiliki pabrik sendiri.

Ratusan ribu ha kebun milik masyarakat ini pada saat kelebihan panen raya kesulitan mengolah tandan buah segar, sehingga pihaknya tertarik melakukan kerjasama membangun pabrik sawit di Jambi.

Dijelaskannya, bila pabrik telah beroperasi pihaknya akan mengkoordinir masyarakat petani pemilik kebun agar hasil

penennya ditampung di perusahaan hasil kerjasama itu.

Mengenai dana yang diperlukan untuk membangun pabrik sawit itu, menurut dia, hingga saat ini belum dirinci, tetapi akan disiapkan sesuai kebutuhan.

Sementara Dirut PT. TI, Ari Fauzi menyatakan telah siap dengan pihak perusahaan swasta nasional membangun pabrik minyak sawit tersebut.

Bungkil Sawit

Terkait dengan sawit, dari Medan dilaporkan, kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi industri pengolahan minyak nabati (SEA) India menyatakan berminat membeli bungkil kelapa sawit dari Indonesia, kata Ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Ir Derom Bangun.

"Beberapa pengusaha India telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka berminat dan akan menjajaki kemungkinan pembelian bungkil kelapa sawit dari Indonesia," ujar Derom usai mendampingi delegasi SEA dalam pertemuan dengan direksi PT Perusahaan Perkebunan (PP) Lonsum di Medan Jumat.

Menurut dia, rencana pengusaha India mengimpor bungkil kelapa sawit itu dinilai sebagai suatu pertanda positif bagi perkembangan usaha tanaman perkebunan kelapa

sawit di dalam negeri sekaligus akan meningkatkan posisi tawar bungkil sawit Indonesia di pasar internasional.

Jika pembelian bungkil itu terealisasi, pihak pengusaha India merencanakan akan mengolah bungkil sawit melalui proses ekstraksi agar menghasilkan minyak sawit.

Derom menambahkan, rencana pembelian bungkil kelapa sawit itu dilaporkan masih akan dibahas lebih lanjut antara pengusaha India dengan kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Bungkil sawit yang dihasilkan dari industri perkebunan kelapa sawit di Tanah Air selama kurun waktu lima tahun terakhir ini telah di ekspor ke berbagai negara diantaranya Australia dan negara di kawasan Uni Eropa (UE).

Komoditi yang masuk kategori limbah kelapa sawit tersebut banyak dijadikan sebagai campuran bahan baku pakan ternak.

India selama tahun 2001 lalu mengimpor 1,5 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan beberapa hasil turunannya dari Indonesia.

"Kami memperkirakan, India tahun 2002 ini juga akan mengimpor sekitar 1,5 juta CPO dan beberapa produk turunan minyak sawit lainnya dari Indonesia," ujarnya, seraya menambahkan India saat ini termasuk pasar potensial bagi minyak sawit Indonesia. (Ant/D-2)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KORAN TEMPO	B.8	13-8-2002

Selamatkan Air Bumi

Kelangkaan air bersih menjadi problem utama di negara-negara berkembang. Menurut PBB, 10-20 ribu anak-anak di negara dunia ketiga meninggal setiap hari lantaran sanitasi yang buruk dan penyakit akibat kekurangan air bersih.

Bayangkan, bisakah kita hidup tanpa air? Jangankan manusia, mobil yang kita tumpangi sehari-hari saja akan panas suhunya apabila kita alpa mengisi radiatornya dengan air. Mungkin, kita bisa bertahan hidup selama sebulan tanpa makanan, tetapi kita tak akan sanggup bertahan hidup tanpa air. Mengapa? Manusia, 65-70 persen tubuhnya terdiri dari air. Air berfungsi menopang tubuh, membantu metabolisme sel, menetralkan dan membuang racun dari dalam tubuh kita.

Karena itu, manusia membutuhkan sedikitnya 2,5 liter air sehari untuk mengatur suhu tubuh—karena suhu tubuh yang normal akan memper lancar fungsi organ-organ tubuh—dan menjaganya tetap normal. Seperti halnya energi, air merupakan hal yang esensial bagi pertanian, industri, dan hampir seluruh kehidupan.

Namun, seiring dengan bertambahnya kegiatan manusia, dan peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan air bersih menjadi problem utama manusia saat ini. Itu sebabnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, Senin dua pekan ke depan, masalah kelangkaan air bersih merupakan salah satu topik penting yang akan dibahas.

Konferensi yang diikuti 60 ribu delegasi dari 170 negara itu bertujuan memantapkan sejumlah program kerja (Agenda 21) untuk mengantisipasi masalah sanitasi serta melestarikan, dan mengamankan sumber daya air—seperti pernah dibahas dalam KTT Bumi di Rio De Janeiro, Brasil, pada 1992. Sebab, menurut catatan PBB pada 1998, sedikitnya 3/5 dari 4,4 miliar orang di negara-negara berkembang hidup tanpa sanitasi yang baik dan seperangnya kekurangan air bersih.

Akibatnya, masih menurut PBB, 10-20 ribu anak-anak di negara Dunia Ketiga meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh air. "Lebih dari satu miliar orang hidup tanpa mengonsumsi air bersih dan dua miliar lainnya karena masalah sanitasi," ujar Gouri Sankar, Direktur Eksekutif pada Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC)—yang memonitor masalah air untuk PBB—seperti dikutip dalam jurnal *Planet Ark* pekan lalu.

Bank Dunia telah mengupayakan dana US\$ 25 miliar per tahun untuk mengembangkan sistem sanitasi dan penyediaan air bersih bagi penduduk negara-negara berkembang selama sepuluh tahun ke depan.

"Kami berupaya agar penduduk di negara berkembang bisa memperoleh air bersih hingga 2008 dan mendapatkan sanitasi yang baik pada 2010," kata Mike Muller, ketua komite organisasi pada konferensi Johannesburg.

Sebenarnya, bumi tak akan pernah kekurangan air dengan adanya siklus abadi air—kitaran hidrologi, yakni sirkulasi air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Bumi menyimpan cadangan air 1,4 miliar km kubik. Tetapi 97 persen berupa air laut, lebih setengah dari sisanya berbentuk gletser, menisakan sumber air utama—air tanah dan air permukaan—kurang dari 30 persen.

Namun persediaan air itu makin terbatas akibat pencemaran sumber-sumber alamiah seperti pengaruh air laut dan aktivitas manusia seperti pembuangan limbah perkotaan, industri—berupa limbah padat dan cair, pemakaian pestisida, maupun pupuk, serta tumpahan zat-zat berbahaya secara tak sengaja.

Persoalan lainnya berupa pengambilan air tanah, baik menggunakan sumur bor maupun artesis. Cara itu menyebabkan menipisnya cadangan air



APRICK SAMMON

tanah, terjadinya intrusi air laut, turunnya permukaan tanah, dan ketergantungan yang besar terhadap air tanah.

Sebenarnya, masalah kelangkaan air bersih tak hanya terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Singapura, misalnya, mengimpor 1.363.828 meter kubik air dari Malaysia. Karena tak memiliki sumber air bersih Singapura terpaksa mengimpor air dari Malaysia hingga 2011. Karena itu, negara tetangga kita itu tengah mengupayakan untuk mendaur ulang air dan memanfaatkan limbah air.

Karena itu, beruntunglah Indonesia yang kaya akan sumber air. Tetapi bagaimana caranya agar sumber itu tak lekas surut? Seperti kata Pangeran Willem Alexander, putra mahkota Kerajaan Belanda yang menjadi salah satu peserta konferensi Johannesburg itu, "Krisis air dunia adalah krisis pemerintahan. Ada banyak cara untuk mengamankan sumber air untuk masyarakat dunia. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika kita bisa mengubah kebiasaan dengan mengatur pemakaian air secara hemat dan efektif." ●

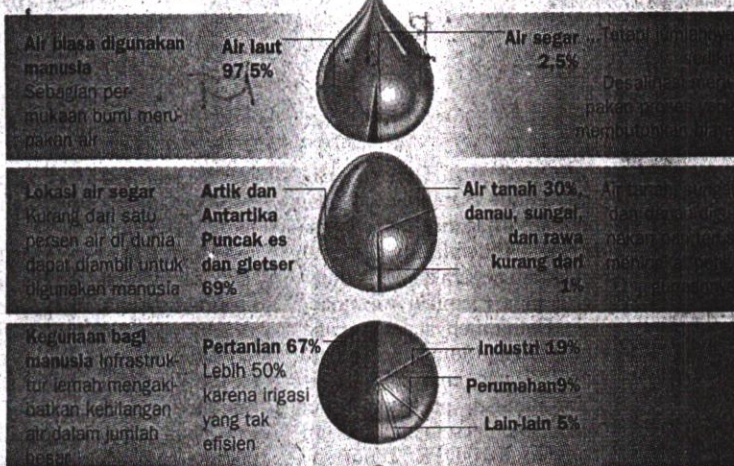
GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

Krisis Air Dunia

Kendati tersedia cukup suplai air di dunia untuk kebutuhan manusia, distribusi yang tak merata dan penggunaan yang tak efisien merupakan penyebab utama kekurangan air. Sedikitnya 1,2 miliar orang hidup tanpa air bersih dan lebih dari 2,4 miliar hidup tanpa sanitasi. Akibatnya, lebih dari 20 ribu anak-anak meninggal setiap harinya.

Setetes air di lautan



Problem

Amerika Utara
Konsumsi air tanah sangat tinggi dari yang tersedia

Afrika Utara
Kekurangan air. Diperkirakan akan semakin buruk pada abad ini

2,2 juta manusia di negara-negara berkembang meninggal setiap tahun karena penyakit yang ditularkan melalui air. Diperkirakan membutuhkan **US\$ 180 miliar** untuk mengurangi separuh jumlah yang tak bisa mengakses air bersih hingga 2015. Investasi saat ini: **US\$16 miliar** per tahun.

Laut Aral:
Penyimpangan menyebabkan kekeringan pada laut

Asia Barat
Jumlah air tak sesuai dengan perkembangan populasi manusia

Asia Selatan
Kegagalan panen akibat tergenang air karena irigasi yang buruk

India
Penipisan air tanah

Cina
400 dan 605 kota kekurangan air. Sungai Kuning kerap mengalami kekeringan

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KOMPAS	20	13-8-2002

Sungai Mamberamo, "Masa Depan Indonesia"

SUNGAI Mamberamo melintasi daerah pegunungan bagian tengah Irian Jaya (Irja) dan bermuara ke Samudera Pasifik di utara. Panjang sungai ini 800 km dengan wilayah resapan mencapai 138.877 km², atau hampir sepertiga luas Irja. Debit air Sungai Mamberamo 5.500 meter kubik (m³) per detik, sehingga bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) raksasa di daerah itu.

DARI 800 km panjang Sungai Mamberamo, 160 km di antaranya dapat dilayari. Walau jangkauan pelayaran cuma 160 km, tetapi bisa menjadi urat nadi pelayaran melintasi wilayah pedalaman Irja. Warna air sungai senantiasa keoklatan, karena membawa bahan sedimentasi dari pegunungan tengah Irja yang diendapkan di dataran rendah Mamberamo.

Sungai terpanjang di Irja ini memiliki dua anak sungai yang berhulu di Pegunungan Jayawijaya dekat perbatasan Papua Niugini, disebut Sungai Taritatu. Anak sungai yang lain berhulu di Pegunungan Sudirmah disebut Sungai Tariku.

Bersama anak-anak sungainya, Sungai Mamberamo membentuk daerah aliran sungai (DAS) yang sangat luas meliputi Kabupaten Jayawijaya, Yapen Waropen, dan Nabire. Sungai yang sangat panjang dan berkelok-kelok ini membentuk sebagian batas alam antara Kabupaten Jayapura, Nabire, Yapen Waropen, dan Jayawijaya.

Sungai Mamberamo bermuara di Tanjung D'Urville kemudian masuk Samudera Pasifik. Aliran sungai di wilayah pantai melintasi daerah berawa yang membentuk hutan sagu yang merupakan makanan pokok masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

PENELITIAN PLN dan Nippon Koei tahun 1983 menunjukkan, debit air Sungai Mamberamo 5.500 m³ per detik. Dan, dari empat lokasi penelitian untuk pembangunan PLTA akan dapat dihasilkan listrik hingga 20.000 megawatt (MW). Potensi sungai yang sangat besar, tetapi murah ini bisa ditujukan untuk pengembangan industri berat maupun kegiatan industri lainnya.

PLTA yang bakal dibangun berada di bagian Mamberamo Tengah dengan luas lokasi mencapai 10.780.000 hektar, suatu lokasi yang sangat luas untuk berbagai kegiatan industri di daerah itu.

Bidang industri yang direncanakan yakni peleburan logam, industri kimia, industri pupuk, industri logam/baja, industri otomotif, industri fuel cell (hidrogen/elektrolisa), dan industri minyak solar dari minyak kelapa sawit. Bidang sosial-ekonomi yang dikembangkan yakni pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (tambak udang), dan tambang rakyat. Bidang transportasi yakni pelabuhan, pengadaan kapal dan prasarana jalan antar-kabupaten.

Luas daerah Mamberamo sendiri mencapai 130.550 km².

Dipekirakan sekitar 75.000 hektar dapat dijadikan daerah industri dan 200.000 hektar sebagai daerah pertanian. Jumlah penduduk tahun 1999 mencapai 10.381 jiwa, atau 0,4 orang per kilometer; terdiri dari 38 suku serta beranekaragam bahasa daerah dan adat istiadat.

PLTA sampai sekarang merupakan sumber energi paling kompetitif. Di samping sifatnya *renewable* (bisa diperbarui) dan bebas pencemaran udara, PLTA menekankan pentingnya penataan dan pelestarian lingkungan hutan secara benar.

Ir Sianipar, Ketua Badan Pembangunan Proyek PLTA dan Industri Mamberamo menjelaskan, PLTA Mamberamo tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, tetapi kawasan tirur Indonesia (KTI), kawasan barat Indonesia dan luar negeri.

Wilayah Mamberamo memberi peluang untuk dikembangkan sebagai areal pertanian dan perkebunan besar dari lahan potensial seluas 2,8 juta hektar lebih. Hamparan dataran itu ditumbuhi beranekaragam pohon dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Daerah ini pernah dikunjungi tim ahli pertanian dari BPPT yang dipimpin BJ Habiebie, pada tahun 1992. Di sana ditemukan endapan humus tanah dari wilayah pegunungan tengah yang dinilai sangat cocok untuk pertanian seperti padi, kacang-kacangan dan jagung serta hortikultura. Jika dikelola secara efisien, wilayah Mamberamo akan menjadi gudang makanan bagi kawasan timur Indonesia.

GUBERNUR Papua JP Slossa menyebutkan, Sungai Mamberamo mempunyai potensi kelistrikan paling besar di seluruh Indonesia. Potensi itu meliputi 34 lokasi dengan total kapasitas sebesar 10 TW (*terawatt*), dengan energi sebesar 56 TWh (*terawatt hours*)/tahun.

Di antara potensi ini terdapat sembilan lokasi yang dapat dipertimbangkan untuk dipelajari lebih lanjut dan empat di antaranya mendapat prioritas lebih awal studi.

Prioritas pembangunan berdasarkan urutan potensi PLTA di DAS Mamberamo yakni Mamberamo-1 dengan kapasitas 5.696 MW dan kemampuan energi 27.021 GWh (*gigawatt hours*)/tahun, Idenburg dengan kapasitas 1.119 MW, dan energi 5.506 GWh/tahun, Mamberamo-2 terdapat 933 MW dengan energi 5.506 GWh/tahun, Sobger-6 kapasitas terpasang 268 MW dan energi sebesar 1.468 GWh/tahun.

Potensi PLTA di DAS Vandewal-8 dengan kapasitas 205

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

MW, sedang energi yang dihasilkan 1.118 GWh/tahun, Ranffaaer-1 sebanyak 300 MW dengan kekuatan energi 2.370 GWh/tahun, Ranffaaer-2 kapasitasnya 103 MW dan energi 905 GWh/tahun, Ranffaaer-3 sebanyak 264 dengan energi 2.086 GWh/tahun, dan potensi PLTA di DAS Sobger-3 sebesar 86 MW dan energi yang dihasilkan Rp 679 GWh/tahun.

"Potensi PLTA di Mamberamo sangat besar bila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan di Papua. Karena itu, pengembangan PLTA tersebut menuntut suatu proyek yang terpadu dengan pembangunan industri skala besar pula," kata Solossa.

Pembangunan PLTA dan industri skala besar dalam satu paket memerlukan pendanaan yang sangat besar dengan risiko sangat tinggi. Di samping itu, industri skala besar memilih lokasi di Irja tentunya tidak semata-mata karena adanya potensi air.

Pembangunan dan pengoperasian PLTA skala besar akan memberi dampak lingkungan yang besar pula. Guna memperkecil dampak lingkungan pembangunan PLTA, maka dapat dilakukan dalam bentuk kaskade (di setiap jeram kecil) dengan unit-unit yang kecil. Tetapi, cara pembangunan kaskade ini membutuhkan biaya yang lebih besar.

Peta dasar topografi yang dijadikan acuan pada saat penelitian tahun 1983, baru mencapai skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh US Army tahun 1967. Selain terlalu kecil skala-

nya, juga masih terdapat garis kontur yang tidak tergambar, sehingga tingkat akurasi perhitungan kurva volume dan area waduk pun tidak akurat.

Tidak tersedianya data hidrologi di daerah Irja terutama data debit aliran sungai dan sedimentasi mengharuskan evaluasi dengan perkiraan kasar berdasarkan data seadanya. Padahal, untuk mengetahui secara pasti besarnya potensi serta kelayakan PLTA di sepanjang Sungai Mamberamo, diperlukan peta dasar dengan skala 1:50.000 lebih. Demi kelengkapan data hidrologi harus segera dibangun pos-pos pencatat tinggi permukaan air (untuk debit aliran) maupun pos-pos curah hujan di sekitar lokasi PLTA. Dalam hal ini pengamatan kualitas air menjadi sangat penting terutama masalah sedimentasi.

Hasil evaluasi *remote sensing* dengan perangkat lunak ER Mapper oleh PLN belum lama ini menunjukkan bahwa sedimentasi di sepanjang sungai Mamberamo sampai ke muara sungai diindikasikan sangat tinggi.

Berkaitan dengan pengembangan PLTA Mamberamo, kata Gubernur Solossa, beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar, persiapan sumber daya manusia setempat, pemanfaatan potensi ekonomi, dan pemanfaatan sumber energi.



MENURUT Ir Sianipar, akibat air Sungai Mamberamo

yang berdebit 5.000 m³ per detik mengalir terus dari Pegunungan Jayawijaya dengan curah air di atasnya mencapai 3.000 mm, maka potensi listrik yang terbuang sebanyak 15.000 MW atau lebih ke Lautan Pasifik. Potensi ini akan terus terbuang selama PLTA Mamberamo belum dibangun.

Pada masa penjajahan Belanda potensi tersebut sudah pernah dilirik. Gubernur Belanda di Hollandia (Jayapura) waktu itu pernah mengirim tim survei untuk meneliti potensi Sungai Mamberamo, namun mereka pulang ke Jayapura karena kesulitan lokasi geografis.

Gubernur Belanda kemudian berusaha mendatangkan helikopter dari Belanda untuk mengadakan survei atas sungai tersebut. Namun, gejolak politik yang mulai merebak di Papua pada tahun 1961 membuat gubernur Belanda membatalkan niat mendatangkan helikopter dan tenaga ahli ke Mamberamo.

Penelitian secara cermat dilakukan tahun 1981-1983 oleh konsultan Nippon Koei dari Jepang. Mereka mengadakan studi pendahuluan dan menyimpulkan, potensi sungai itu sangat besar dan dapat menyediakan kebutuhan energi listrik untuk industri besar.

Semasa Prof BJ Habibie menjabat sebagai Menristek, Proyek Mamberamo dipromosikan ke negara-negara maju seperti AS, Jepang, Australia, dan Jerman. Namun, para investor tidak terlalu tertarik, karena Pemerintah Indonesia

dianggap belum mampu membangun PLTA besar, dan investasi di Mamberamo dianggap belum mendesak, karena persediaan listrik masih cukup.

Kini sejumlah perusahaan asing berminat investasi di Mamberamo jika PLTA dibangun. Minat ini lebih nyata setelah konsorsium Mamberamo melangkah lebih konkret menyusun *extended term of reference (TOR)*, bahkan telah membuat lukisan fantasi (*artist's impression*) bersama dengan CSIRO (*Commonwealth Scientific Industrial Research Organization*) Australia.

Ketika menjabat sebagai presiden, Habibie sempat memerintahkan Menristek untuk membentuk tim kerja yaitu Tim Penyiapan Proyek Mamberamo (TPPM) dengan anggota terdiri dari Bappenas, BPN, Pemda Papua, swasta, dan tokoh masyarakat Indonesia Timur. Tugas tim ini menyiapkan konsep Keputusan Presiden (Keppres), sebelum terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Mengingat konsep Keppres tersebut masih didominasi kekuasaan pusat, maka Pemda Papua mendahului dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur yang berisi Pembentukan Badan Pembangunan PLTA dan Mamberamo (BP PIM) yang dipimpin Ir Sianipar. Badan ini diharapkan dapat melakukan sejumlah terobosan dalam pembangunan di Papua secara besar-besaran.

(KORNELIS KEWA AMA)

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KOMPAS	20	13 - 8 - 2002

Berdayakan Suku-suku di Mamberamo

RENCANA pembangunan megaprojek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mamberamo mengundang komentar dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Mereka terutama minta agar sebelum PLTA dibangun, suku-suku di sekitar lokasi itu terlebih dahulu diberdayakan. Dengan demikian, mereka dapat berperan serta dalam pembangunan proyek-proyek di Mamberamo.

Ketua Komisi F DPRD Papua yang membidangi HAM (hak asasi manusia) dan Lingkungan Hidup, Pdt Augustin Iwanggin mengatakan jumlah penduduk di kawasan Mamberamo Tengah sekitar 10.351 jiwa terdiri dari 38 suku. Mereka berdiam di sekitar lokasi yang terpelempar sesuai hasil hutan dan potensi makanan yang disediakan di Sungai Mamberamo.

Sumber daya masyarakat di sekitar Sungai Mamberamo baik Mamberamo Hulu, Hilir, Mamberamo Tengah maupun Tor Atas harus ditingkatkan. Termasuk pembangunan gedung sekolah, pendidikan, kesehatan, dan sarana jalan yang menuju ke Kota Jayapura.

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Evensius Lusi Tolok menambahkan, dari hasil kunjungan DPRD Jayapura beberapa waktu lalu kondisi pendidikan dan kesehatan di daerah itu macet total. Para guru dan tenaga kesehatan sudah meninggalkan tempat tugas masing-masing menyusul isu terjadinya penyerangan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

"Jangankan isu politik, hari-hari biasa saja pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah itu tidak jalan. Kehidupan masyarakat masih sangat tradisional. Tidak ada sarana pasar, perdagangan, transportasi darat yang menghubungkan Jayapura membuat wilayah itu sangat terisolasi," kata Tolok.

Mata pencarian penduduk yang disiapkan Sungai Mamberamo adalah memburu buaya, ikan, udang, dan belut. Selain itu sungai itu juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pelayaran di

wilayah pedalaman.



KETUA Adat Masyarakat Mamberamo Hulu, Wempy Salabi, menyebutkan, buaya merupakan binatang perburuan yang dilakukan masyarakat lokal sejak tahun 1980-an. Binatang tersebut ditangkap masyarakat kemudian dijual kepada para pengusaha buaya di Jayapura dengan harga Rp 10.000 per inci.

Terdapat beberapa perusahaan buaya beroperasi di daerah Mamberamo antara lain Bintang Mas. Perusahaan ini setiap tahun memelihara 25.000 ekor buaya di tempat penangkaran buaya di Jayapura, yang didatangkan dari Sungai Mamberamo.

Perusahaan yang beroperasi di Mamberamo—sekali-gus dinilai masyarakat membantu kehidupan masyarakat sekitar. Mereka membawa gula, beras, ikan kering, dan obat-obatan untuk ditukarkan kepada masyarakat dengan anak buaya. Namun, belakangan ini populasi buaya di daerah itu sudah mulai menyusut. Ini diketahui dari hasil perburuan buaya yang semakin berkurang.

Oleh karena itu, masyarakat adat di Mamberamo Hulu memutuskan untuk tidak lagi memburu buaya selama dua tahun berturut-turut. Perhentian perburuan buaya tersebut dengan harapan dapat meningkatkan populasi buaya di daerah itu.

Selain buaya, Sungai Mamberamo juga sebagai penghasil ikan, udang, dan belut yang merupakan sumber mata pencarian masyarakat sehari-hari. Di sekitar Mamberamo terdapat hutan sagu sampai 150.000 hektar. Di tempat ini masyarakat setiap hari menokok sagu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Cerita Sungai Mamberamo dan sekitarnya sebagai gudang makanan masyarakat sekitar, tidak jauh berbeda dengan cerita wilayah Tembagapura Tempo Doeloe sebagai penghasil sagu, sungai-sungai sebagai penghasil ikan dan udang. Tetapi, sumber hidup masyarakat tersebut akhirnya rusak oleh eksploitasi PT Freeport Indonesia.

Karena itu, menurut Wempy, sebelum pembangunan PLTA di daerah itu, semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek PLTA dan pembangunan industri di daerah itu harus membuat kesepakatan bersama dengan masyarakat adat di sekitar Sungai Mamberamo. Mereka harus berjanji tidak merusak hutan sagu, tidak mengganggu mata pencarian penduduk lokal.

Yayasan Lingkungan Hidup (Yali) Papua yang menanganai hutan lindung dan keanekaragaman hayati di Sungai Mamberamo melalui direktornya, Robert Mandosi mati-matian menentang kehadiran PLTA di daerah itu kalau tidak memberdayakan penduduk lokal terlebih dulu. Penduduk lokal adalah ahli waris sungai dan hutan di Mamberamo karena itu mereka tidak boleh ditelantarkan.

"Jangan bicara mengenai PLTA raksasa itu, sebelum bicara mengenai pemberdayaan masyarakat lokal di Mamberamo. Mereka harus menjadi peserta utama dalam pembangunan itu, karena itu sebelum membangun PLTA berdayakan masyarakat lokal secara keseluruhan. Jangan hanya memperhatikan ketua adat dan tokoh-tokoh yang disegani di daerah itu," kata Mandosi.

Pembahasan dan presentasi mengenai Proyek PLTA di Mamberamo sejak tahun 1985 sampai sekarang tidak pernah menyinggung pemberdayaan masyarakat lokal. Bahkan, pembicaraan itu hanya berlangsung di Jakarta oleh orang-orang yang tidak pernah singgah di Mamberamo.

Dalam kaitan ini para aktivis lingkungan dan ahli keanekaragaman hayati terus melakukan berbagai penelitian di sekitar Sungai Mamberamo. Akhir tahun 2000 penelitian yang disponsori CI (Conservation International) Papua di sekitar Sungai Mamberamo menemukan sekitar 25.000 spesies tumbuhan berkayu, 164 spesies mamalia, 329 spesies amphibia dan reptilia, 650 spesies burung, dan 1.200 spesies ikan.

(KOR)